

OPEN ACCESS

Citation: Yulyanah. (2023). Faktor Determinan Kemiskinan Di Provinsi NTT Tahun 2015-2019. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 118-137

Received: May 4, 2023
Revised: June 5, 2023
Accepted: June 5, 2023
Published: July 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

FAKTOR DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2019

Determining Factors of Poverty In East Nusa Tenggara Province 2015-2019

Yulyanah¹⁾

¹⁾ Universitas Trisakti, Jakarta

email: yulyanah.acc@gmail.com

Abstract

Poverty is one of the phenomena that occurs in all developing countries which is a big problem for the government in dealing with it. East Nusa Tenggara Province is the third poorest province in Indonesia. This study aims to analyze the factors that influence poverty levels in East Nusa Tenggara Province. The research data used secondary data obtained from BPS and the Ministry of Finance, namely Gross Regional Domestic Product (GRDP), data on government spending in education, access to proper drinking water, proper sanitation facilities, Gender Empowerment Index (IDG), and real per capita spending. The method uses panel data regression analysis using data in 2015-2019 in regencies and cities of East Nusa Tenggara Province.

The results of panel data regression show that in 2015-2019 the independent variables that have a significant effect on poverty levels in East Nusa Tenggara Province are GDRP, decent drinking water sources, decent sanitation facilities, gender equality, and per capita real expenditure. Meanwhile, what does not have a significant effect on the poverty rate is government expenditure on education. Together, the variables of GRDP, government expenditures in the education sector, access to proper drinking water, proper sanitation facilities, gender equality and per capita real expenditure have a significant effect on the poverty level.

Keywords: *Poverty Level, East Nusa Tenggara Province, Panel Data*

JEL Classifications: *I32; I38; R11.*

I. PENDAHULUAN

Menurut World Bank yang dipublikasikan pada tahun 2004 dalam Fikri dan Suparyati (2017), jumlah penduduk miskin secara global mencapai 689 juta orang yang dikategorikan sangat miskin atau 9,2 persen dari populasi penduduk global hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pada tahun 2015, negara-negara merancang suatu agenda pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals* yang merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Pelaksanaan MDGs ini dilaksanakan selama 14 tahun dan dilakukan pemantauan secara berkala menggunakan beberapa indikator pencapaian program yang dilakukan oleh masing-masing negara dan hasilnya menunjukkan pelaksanaan MDGs dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan dan 169 target dalam upaya program pembangunan dan terdapat empat pilar yang tertuang dalam kesepakatan SDGs diantaranya adalah pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pembentukan program pembangunan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berperan dalam pembangunan tahun 2015-2030 khususnya bagi pemerintah Indonesia. Dalam komitmen tersebut, Indonesia telah menyepakati 17 komitmen SDGs yang akan dilaksanakan sampai tahun 2030. Bahkan, 17 komitmen SDGs dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan tujuan agar SDGs tersebut dapat tercapai pada tahun 2019.

Kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pembangunan guna mengurangi laju pertumbuhan penduduk miskin. Namun, masalah kemiskinan masih belum dapat teratasi. Berdasarkan data BPS, terdapat 5 provinsi termiskin di Indonesia diantaranya:

Tabel 1. Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2022

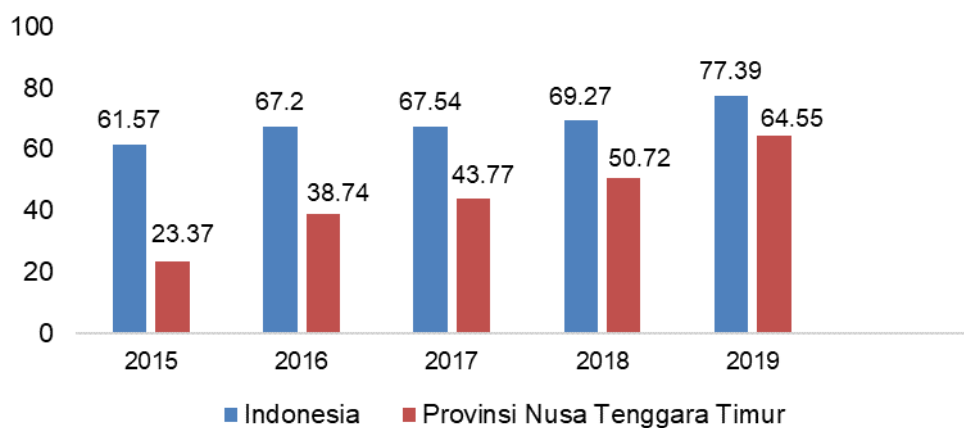
No	Provinsi	Persentase Kemiskinan
1	Papua	26,80
2	Papua Barat	21,43
3	NTT	20,23
4	Maluku	16,23
5	Gorontalo	15,51

Sumber: BPS, 2023

Jika kita lihat tabel di atas, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia dimana persentase kemiskinan mencapai 20,23 persen. Beberapa kabupaten yang saat ini statusnya daerah dengan kemiskinan ekstrem yaitu Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bahan bakar atau energi untuk memasak, sumber penerangan, akses

air bersih dan fasilitas sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup serta pendapatan yang tidak layak di NTT.

Menurut Kementerian Kesehatan, Provinsi NTT memiliki banyak anak stunting di atas 40 persen pada tahun 2015 dan 2017. Penyebab banyaknya anak stunting dan bayi gizi buruk disebabkan karena faktor kesehatan lingkungan. Menurut World Health Organization dalam Mayasari (2020), rendahnya kualitas kesehatan lingkungan akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, kesehatan lingkungan yang meliputi fasilitas sanitasi layak dan akses air bersih yang berperan dalam mencegah penyakit menular, berkontribusi dalam mengurangi gizi buruk dan stunting serta mengurangi keterbelakangan mental anak. Berikut ini, peneliti mencoba menampilkan proporsi sanitasi layak di Provinsi NTT periode tahun 2015-2019.

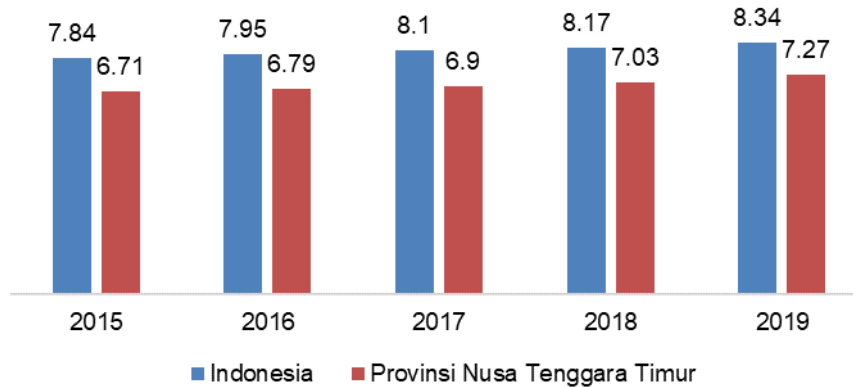


Gambar 1. Proporsi Populasi Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan (Persen)

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa hampir 50 persen penduduk Provinsi NTT belum memiliki sanitasi yang layak sehingga akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh kualitas dari kelembagaan, kekurangan pangan, strategi bertahan hidup dan memiliki kesempatan kerja terbatas, dan dukungan infrastruktur terbatas, masih bekerja di sektor pertanian. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak akan pernah ada habisnya, meskipun masih terjadi di setiap negara di dunia.

Penyebab faktor kemiskinan lainnya adalah tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan formal adalah kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah (Palenewen et al., 2018). Pendidikan yang berkualitas juga akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdampak pada pembangunan bangsa. Dan di bawah ini, peneliti mencoba menampilkan tabel mengenai rata-rata lama sekolah layak di Provinsi NTT periode tahun 2015-2019.



Gambar 2. Rata-Rata Lama Sekolah (Persen)

Sumber: BPS, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Provinsi NTT masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasional. Pendidikan yang rendah akan menurunkan kualitas sumber daya manusianya.

Selanjutnya, faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan adalah ketimpangan gender. Kesetaraan gender masih menjadi isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena di Provinsi NTT menganut budaya patriarki yang menomerduakan hak perempuan, sehingga keadaan seperti ini akan merugikan pihak perempuan. Menurut Rogan (2016), di negara-negara berkembang perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan multidimensi daripada laki-laki karena kurangnya akses layanan dasar seperti akses kesehatan dan ketimpangan di pasar tenaga kerja.

Sementara itu dari segi ekonomi, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 30,42 persen, sektor jasa sebesar 16,42 persen, dan sektor perdagangan dan rumah makan sebesar 15,87 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga tercermin dari konsumsi masyarakat. Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah pusat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Wilayah Jangka Menengah Nasional penanganan masalah kemiskinan, wilayah perbatasan dan daerah rawan bencana.

Berdasarkan atas penjelasan-penjelasan di atas, baik yang dimuat dalam data BPS maupun artikel ilmiah, menjelaskan bahwa pentingnya pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tingkat kemiskinan di suatu provinsi Indonesia. Provinsi yang menjadi objek penelitian ini adalah Provinsi NTT.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997) dalam Sartika et al (2016), penyebab kemiskinan adalah:

- a. Secara mikro, penyebab kemiskinan adalah adanya perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan pendapatan. Keterbatasan jumlah sumber daya dan kualitas sumber daya yang rendah pemicu kemiskinan;

- b) Kemiskinan muncul yang diakibatkan adanya ketidaksamaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas rendah dan berdampak pada rendahnya penghasilan yang diterima. Rendahnya kualitas sumber daya manusia diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan; dan
- c) Kemiskinan yang diakibatkan karena adanya perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini melahirkan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan dan kekurangan modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah. Pendapatan rendah mempengaruhi tabungan dan investasi yang rendah, investasi rendah menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya.

Menurut BPS (2016), penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu sendiri mencakup dua kategori: garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan, setara dengan 2.100 kalori/orang/hari. Garis kemiskinan bukan makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Monang et al. (2018), keberhasilan pembangunan nasional suatu negara dilihat dari segi pengendalian tingkat kemiskinan. Terdapat 3 aspek sebagai pemicu meningkatnya kemiskinan diantaranya aspek demografi, aspek pendidikan dan aspek ekonomi. Sementara menurut Nunung (2008), penyebab kemiskinan adalah pendidikan, jenis pekerjaan, gender, kesehatan dan infrastruktur, dan lokasi geografis.

2. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur dalam harga tahunan berlaku, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur dalam harga barang dan jasa, satu tahun diberikan sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan perubahannya. PDRB harga tetap digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode tertentu (tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal).

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan yaitu;

- a. Pendekatan Produksi
PDRB adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah selama periode tertentu (biasanya satu tahun).
- b) Pendekatan Pendapatan
Menurut pendekatan ini, balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Remunerasi faktor disebutkan sebagai upah dan gaji, sewa tanah, keuntungan modal dan keuntungan, semua sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung bersih (pajak produksi dan impor dikurangi subsidi).
- c) Pendekatan Pengeluaran
PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (a) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (b) pengeluaran konsumsi akhir oleh organisasi nirlaba yang melayani rumah tangga; (c) total belanja konsumen akhir pemerintah; (d)

pembentukan modal tetap domestik bruto; (e) perubahan penawaran; dan (f) ekspor bersih (ekspor dikurangi impor).

3. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Menurut Meier (2014) dalam Kahang (2016), pengeluaran pemerintah di bidang sektor pendidikan akan berdampak positif pada peningkatan jumlah murid yang dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kualitas pendidikan yang baik akan membentuk sumber daya manusia yang unggul, terampil dan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan.

Menurut Kahang (2016), anggaran pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa yang lebih baik, sedangkan dana cadangan pendidikan digunakan untuk perbaikan fasilitas pendidikan seperti bangunan/gedung sekolah yang rusak akibat terkena bencana alam dan dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) pengelola dana bidang pendidikan.

4. Kesehatan

Menurut Widodo et al. (2012), kesehatan adalah hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan masyarakat akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat mengukur kesehatan masyarakat adalah indikator kesehatan lingkungan.

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Mayasari (2020), kesehatan lingkungan yang terdiri dari akses sanitasi layak, akses air bersih, dan layanan kebersihan berperan penting bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi negara termasuk di Indonesia. Lingkungan yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat seperti, rentan terkena penyakit menular, dan menghambat perkembangan mental anak. Beberapa faktor yang memengaruhi kerusakan lingkungan yaitu, air dan sanitasi yang tidak layak, polusi udara. Negara yang memiliki lingkungan yang sehat berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Menurut Putra dan Rianto (2016), keberadaan sumber air bersih sangat erat hubungannya dengan kondisi kesehatan masyarakat. Sumber air yang tidak layak akan menimbulkan berbagai penyakit menular. Ketersediaan akses sumber air minum layak harus menjadi prioritas pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Ketersediaan air yang cukup akan mempengaruhi produktivitas, baik pada sektor barang maupun jasa.

5. Kesetaraan Gender

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019), kesetaraan gender adalah kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia, untuk berpartisipasi dan menjalankan perannya dengan baik di bidang ekonomi, politik, politik - ekonomi, budaya - masyarakat, pertahanan negara, keamanan dan kesetaraan di bidang penerima manfaat dari capaian pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah untuk

mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Menurut Alfana dan Arif (2017), pembangunan gender bertujuan untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Ketimpangan tersebut ditunjukkan dalam angka atau indeks. Semakin rendah indeksinya, maka semakin besar ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan di dalam pembangunan. Pemberdayaan gender yang diukur dengan indeks pemberdayaan gender (IDG), bertujuan untuk mengukur partisipasi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya. Perhitungan IDG memiliki kesamaan dengan perhitungan IPG. Pertama-tama, Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata, dihitung kemudian dibagi dengan nilai 50. Skor 50 dianggap sebagai kontribusi ideal setiap kelompok gender untuk semua komponen SDI. Tidak ada bobot khusus untuk salah satu metrik dalam perhitungan GDI. Indikator lain untuk mengukur GDI adalah bagian perempuan dalam pendapatan tenaga kerja, secara umum nilai bagian perempuan dalam pendapatan tenaga kerja menunjukkan bahwa upah yang diterima perempuan di sektor tenaga kerja lebih rendah daripada di sektor tenaga kerja dengan laki-laki.

6. Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga dalam sebulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang disesuaikan dengan kesehatan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marjinal. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan memberikan wawasan tentang tingkat daya beli masyarakat (PPP) dan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan pembangunan manusia di suatu daerah. Purchasing Power Parity (PPP) memungkinkan perbandingan harga riil lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang umum digunakan dapat mengurangi atau meningkatkan nilai daya beli terukur dari konsumsi yang disesuaikan per orang.

7. Kajian Empiris

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Rahmiyanti (2017) melakukan analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan fasilitas kesehatan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi NTT Tahun 2011-2015. Hasil penelitian menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan fasilitas kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Fithri dan Kaluge (2017) melakukan studi yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Nalle dan Kiha (2018) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Hasil analisis menunjukkan

bahwa jam kerja, pendidikan, umur dan pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap penghasilan keluarga miskin di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Rika et al. (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di DKI Jakarta, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Dama et.al. (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Hasil menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.

Labola et al. (2018) melakukan studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di NTT. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT. Fikri dan Suparyanti (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi NTT.

Muhammad et al. (2020) melakukan studi mengenai analisis pembangunan gender di Provinsi NTT Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan pemberdayaan gender di Provinsi NTT masih rendah. Nilai IPG antar kabupaten/kota di NTT tidak merata, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan manusia belum mendapat perhatian yang sama dan perlu diperkuat melalui berbagai program dan kebijakan. Terutama alokasi anggaran untuk perempuan.

Rogan (2016) melakukan penelitian gender dan kemiskinan multidimensi di Afrika Selatan: menerapkan Indeks Kemiskinan Multidimensi Global (MPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan sangat rentan, dan berdasarkan analisis dari waktu ke waktu, kemiskinan aset telah difeminisasi pada periode pasca-*apartheid*. Oleh karena itu, beasiswa yang ada di Afrika Selatan menunjukkan bahwa, pada tingkat rumah tangga, yang di kepalai oleh perempuan dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi dari deprivasi berganda atau kemiskinan aset daripada di kepalai oleh laki-laki. Putri et al. (2019) melakukan analisis kemiskinan berdasarkan gender di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, status pekerjaan, jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan kesetaraan gender berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Putra dan Rianto (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh akses air bersih terhadap kemiskinan di Indonesia: pengujian data rumah tangga. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rumah tangga (RT) yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas air bersih memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah sebesar 17,17 persen dibandingkan RT yang memiliki akses air bersih. Kemungkinan menjadi RT miskin juga lebih tinggi 1,29 persen pada RT yang tidak memiliki akses air bersih. Manoppo et al. (2018) melakukan studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kota Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan rasio luas lantai per kapita berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Manado. Mayasari (2020) telah melakukan penelitian mengenai pengelompokan provinsi berdasarkan variabel kesehatan lingkungan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2018. Hasil pengujian menunjukkan indikator kesehatan air

minum layak, hunian layak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sedangkan fasilitas sanitasi layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan Munoz-Pina et al. (2011) telah melakukan analisis kemiskinan dan lingkungan di Meksiko. Dengan menghubungkan hasil-hasil ini dengan literatur kesehatan lingkungan, kami menyoroti kebutuhan untuk memfokuskan upaya pada pengenalan teknologi hijau dan investasi modal alam secara tepat di wilayah-wilayah di mana terdapat kerentanan ganda lingkungan-kemiskinan. Tidak melakukan hal itu akan membahayakan pertumbuhan pendapatan saat ini dan masa depan dari sebagian besar desil pendapatan termiskin di Meksiko. Pasal 4 Konstitusi Meksiko menyatakan bahwa semua orang Meksiko berhak atas "lingkungan yang sehat". Mengukur, menempatkan, dan mengarahkan kebijakan ekonomi hijau yang baik terhadap area kritis dan populasi yang teridentifikasi adalah satu-satunya cara untuk benar-benar maju menuju tujuan ini. Kemiskinan di Meksiko tidak akan dapat diatasi dengan tangguh tanpa melindungi lingkungan.

Pratama (2015) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa IPM dan konsumsi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan inflasi, pendidikan, dan pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Rahman dan Alamsyah (2019) melakukan studi pengaruh pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap kemiskinan masyarakat migran di Kota Makasar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan konsumsi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat migran di Kota Manado. Rizki dan Saleh (2007) melakukan penelitian Analisis Keterkaitan Akses Sanitasi dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses sanitasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan deskriptif, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini, melihat fenomena kemiskinan pada 22 kabupaten/ kota di Provinsi NTT. Penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dari BPS dan Kementerian Keuangan untuk mengetahui tingkat jumlah penduduk miskin selama periode penelitian. Data sekunder yang digunakan yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, akses air minum layak, fasilitas sanitasi layak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan pengeluaran riil per kapita disesuaikan periode 2015-2019 pada Provinsi NTT.

2. Metode Analisis

Untuk alat analisis dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dependen kemiskinan, sedangkan variabel independennya adalah PDRB, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, akses air minum layak, fasilitas sanitasi layak, indeks pemberdayaan gender dan pengeluaran riil per kapita disesuaikan. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu sebagaimana model pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmaddien (2019).

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut:

$$TK = \alpha_{it} + \beta_{1it}PDRB_{it} + \beta_{2it}PDD_{it} + \beta_{3it}AM_{it} + \beta_{4it}FS_{it} + \beta_{5it}IDG_{it} + \beta_{6it}PP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Di mana:

Kemiskinan _{it}	: Indeks Keparahan Kemiskinan
α_{it}	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDD	: Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan
AM	: Akses Air Minum Layak
FS	: Fasilitas Sanitasi Layak
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
PP	: Pengeluaran Riil Per kapita disesuaikan
ε_{it}	: Error regresi data panel
i	: Obyek (kabupaten/kota)
t	: Tahun

Dari semua data yang ada, yaitu variabel dependen Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) dan variabel independen Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pendidikan, akses air minum layak, fasilitas sanitasi layak, kesetaraan gender (IDG), pengeluaran riil per kapita disesuaikan akan dilakukan proses pengolahan data dengan cara komputerisasi dengan bantuan *Eviews 9*. Kemudian dilakukan proses interpretasi data dengan tingkat kesalahan sebesar ($\alpha = 5\%$). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan 3 pendekatan estimasi, sehingga dilakukan pengujian untuk menentukan model mana yang tepat, yaitu *common effect*, *fixed effect* atau *random effect*.

Langkah pertama adalah memilih model yang akan digunakan dengan melakukan regresi pada masing-masing model yang akan digunakan, khususnya model *common effect*, kemudian melakukan regresi untuk metode *fixed effect*. Langkah selanjutnya adalah memilih metode menggunakan *common effect* atau *fixed effect* dengan melakukan uji Chow (*Redundant Fixed Effect Test*) setelah terpilih metode *fixed effect* kemudian dilanjutkan dengan melakukan regresi *random effect*. Langkah selanjutnya adalah uji Hausman untuk mengetahui model mana yang lebih baik, antara *fixed effect* atau *random effect*.

Apabila prob. *cross-section chi-square* < dari α (0,05), maka model yang terpilih adalah *fixed effect* dan apabila prob. *cross-section chi-square* > dari α (0,05), maka model yang terpilih adalah *common effect* pada uji Chow. Berdasarkan tabel 10 model yang terpilih adalah *fixed effect* ($0.0001 < 0,05$). Selanjutnya, setelah terpilih model *fixed effect* dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, dimana uji ini untuk memilih model *random effect* atau *fixed effect*. Apabila *cross-section random* < dari α (0,05), maka model yang terpilih adalah *fixed effect* dan apabila *cross-section random* > dari α (0,05), maka model yang diterima adalah *random effect*. Berdasarkan tabel 10 model yang terpilih adalah *fixed effect* ($0,0002 < 0,05$).

Namun, ketika melihat hasil dari model *fixed effects* tersebut ternyata tidak ada yang berpengaruh dalam penelitian yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara titik

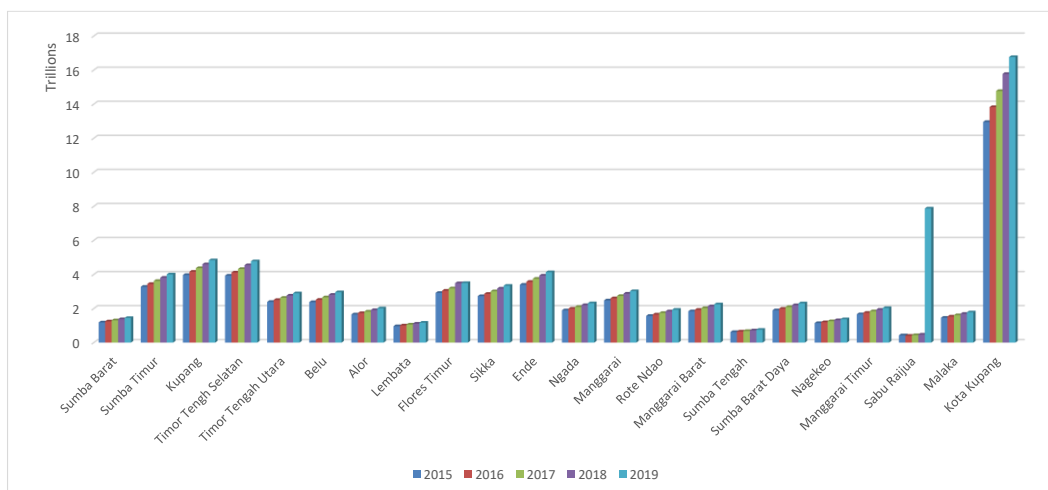
observasi ke garis regresi bervariasi misalnya, ketika ingin melihat pengaruh omzet terhadap laba, perbedaan laba yang didapat antara perusahaan-perusahaan yang tergolong beromzet kecil tentunya tidak besar berbeda dengan perusahaan yang tergolong beromzet besar, perbedaannya tentu akan lebih besar (Gujarati, 2010).

Kondisi seperti itulah dikatakan adanya pelanggaran heteroskedastisitas/ *heteroscedasticity*, sehingga membuat model regresi tersebut tidak efisien atau akurat serta mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi koefisien regresi terganggu. Heteroskedastisitas merupakan suatu penyimpangan asumsi *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam bentuk varian gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS tidak bernilai konstan.

Pelanggaran tersebut juga diakibatkan karena adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengujian pada model regresi. Umumnya permasalahan heteroskedastisitas banyak ditemui pada data *cross section* dan *time series*, karena pengujian dilakukan pada individu yang berbeda di tahun yang sama. Ada beberapa metode untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas yaitu dengan metode grafik, uji Park, uji Glejser, uji korelasi Spearman, uji Goldfeld-Quandt, uji Bruesch-Pagan-Godfrey, dan uji White (Winarno, 2009). Dalam mengatasi masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: a) menggunakan metode (*Generalized Least Squares/GLS*); dan b) metode transformasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

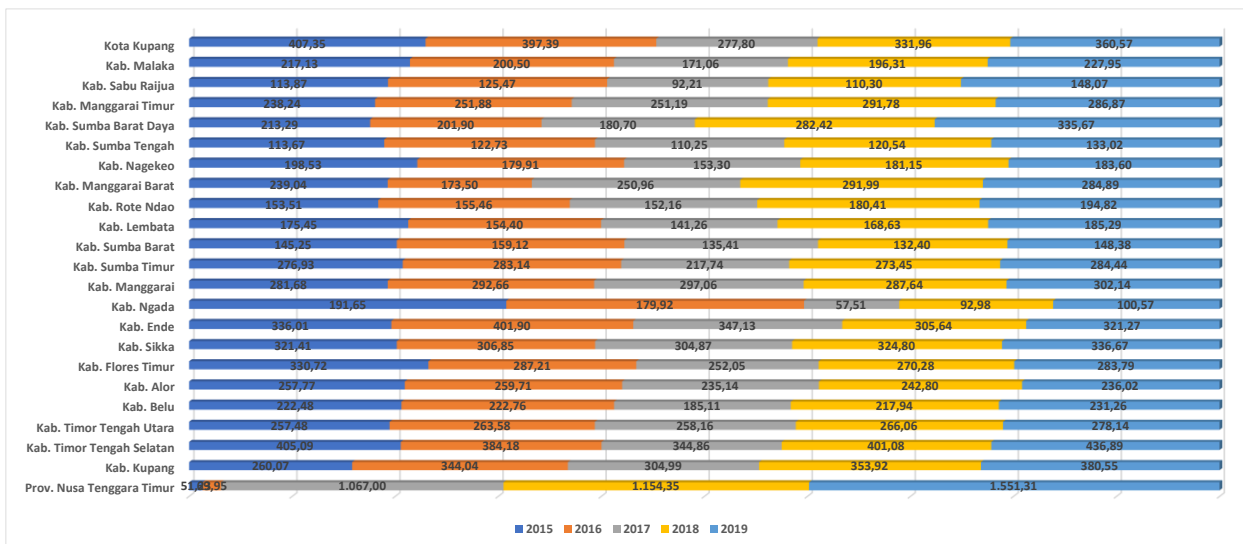
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berikut dibahas data dan informasi yang diperoleh. PDRB kabupaten/kota di Provinsi NTT dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB yang paling tertinggi berasal dari daerah Kota Kupang. Sedangkan untuk PDRB terendah terletak di Kabupaten Sumba Tengah.



Gambar 3. Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019

Sumber: BPS, 2023.

Berdasarkan pada gambar 4 dapat dilihat variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di Provinsi NTT tahun 2015-2016. Jika kita lihat rata-rata anggaran pendidikan tanpa transfer ke daerah di Provinsi NTT hanya sebesar 13,18 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 sebesar 14,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah Provinsi NTT di bidang pendidikan belum sepenuhnya menjadi perhatian selama beberapa tahun.



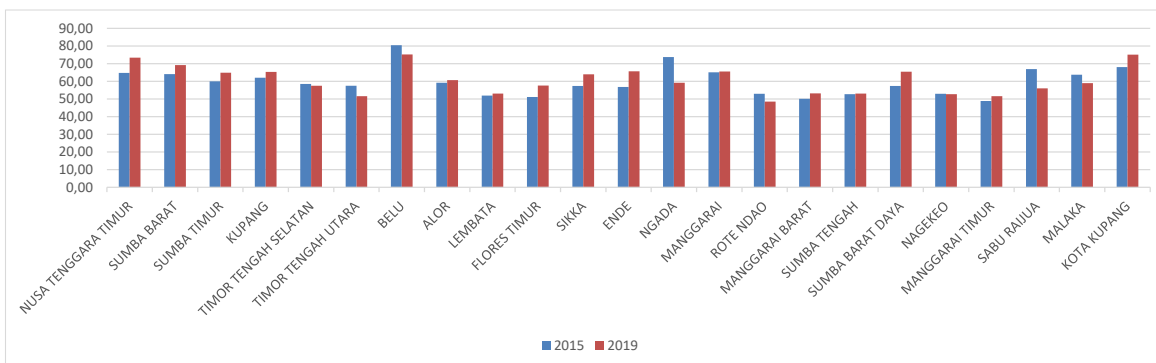
Gambar 4. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2015-2019
Sumber: Kemenkeu 2023

Jika kita melihat kondisi kemiskinan di Provinsi NTT, terlihat dalam tabel indeks keparahan kemiskinan Provinsi NTT di tahun 2015 sebesar 1,07 dan pada tahun 2019 hanya naik 0,06 menjadi sebesar 1,13.

Kabupaten/kota	Sumba Barat	Sumba Timur	Kupang	Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Utara	Belu	Alor	Lembata	Flores Timur	Sikka	Ende	Ngada	Manggarai	Rote Ndao	Manggarai Barat	Sumba Tengah	Sumba Barat Daya	Nagekeo	Manggarai Timur	Sabu Raijua	Malaka	Kota Kupang	NTT
2015	1,19	1,4	1,5	1,74	0,98	0,65	0,81	1,59	0,14	0,44	0,74	0,6	1,17	2,13	0,79	1,34	1,12	0,47	1,09	1,81	0,36	0,29	1,07
2016	1,73	2,18	0,8	1,4	0,95	0,81	0,52	2,26	0,12	0,32	1,64	0,46	1,32	2,72	0,85	1,84	1,22	0,42	1,35	1,33	0,87	0,3	1,29
2017	1,51	2,67	1,3	2,15	0,72	0,59	1,27	1,37	0,23	0,3	1,71	0,62	1,09	1,97	1,09	2,51	1,02	0,24	1,17	2,21	0,32	0,41	1,17
2018	0,93	2,16	0,87	1,96	1,13	0,45	0,86	1,09	0,24	0,29	1,68	0,65	0,78	1,13	1	1,66	1,49	0,46	1,02	1,85	0,43	0,39	1,03
2019	1,37	3,14	1,28	2,09	1,09	0,61	1,07	1,28	0,18	0,47	1,11	0,65	0,92	1,33	0,9	2,2	0,93	0,42	1,15	1,78	0,7	0,39	1,13

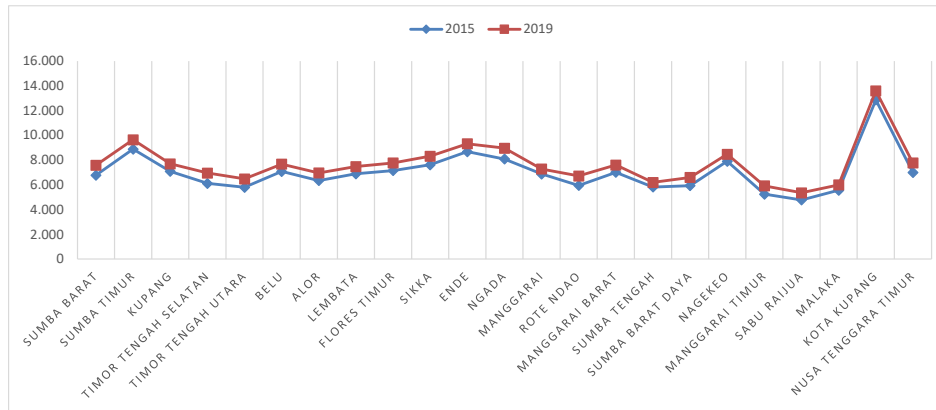
Gambar 5. Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2015-2019
Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan variabel IDG untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi terlihat adanya peningkatan indeks dari tahun 2015 sampai 2019. Provinsi NTT memiliki skor IDG sebesar 64,75 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,37 persen. Hal ini menandakan keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional dan kontribusi dalam pendapatan pekerjaan di Provinsi NTT meningkat.



Gambar 6. Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTT Tahun 2015-2019
Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan variabel pengeluaran per kapita yang mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli, Provinsi NTT masih relatif rendah. Pada tahun 2015, pengeluaran riil per kapita Provinsi NTT sebesar Rp7.003.000 atau sebesar Rp583.000 per bulan dan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp7.769.000 atau sebesar Rp647.416 per bulan.



Gambar 7. Pengeluaran Riil per Kapita Provinsi NTT Tahun 2015-2019
 Sumber: BPS, 2023.

Sementara untuk variabel akses air minum layak dan fasilitas sanitasi layak di Provinsi NTT rata-rata sudah mencapai 100 persen.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu cara yaitu melakukan pembobotan, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil tersebut dapat dilihat pada output di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Estimasi

Variabel	Hipotesa	Koefisien		
		Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
C		0.032350	0.009361	0.009022
IDG	+	-0.012672	0.000861	* 0.001414
Riil	-	6.31E-05	-7.09E-05	* 7.77E-05
Pend	-	-2.22E-05	-1.37E-06	-1.65E-06
Sanistasi	-	-0.005448	-0.000346	* -0.000602
Sumber Air	-	-0.072048	-0.009151	* 0.010242
PDRB	-	4.16E-06	-5.70E-07	* -6.25E-07
<i>R-Squared</i>		0.988855	0.997333	0.042060
<i>Adjusted R-Square</i>		0.865186	0.996454	-0.013743
<i>F-Statistic</i>		269.4689	1135.516	* 0.753726
<i>Uji Chow</i>		461.805849	* Fixed Effect	
<i>Uji Hausman</i>		39.448925	* Fixed Effect	

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9
 Keterangan: (*) Signifikan pada (5%)

Tabel 3. Hasil Coefficient

C	0.009361
IDG	0.000861
Riil	-7.09E-05
Pend	-1.37E-06
Sanitasi	-0.000346
Sumber Air	-0.009151
PDRB	-5.70E-07

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil tabel koefisien di atas, menunjukkan bahwa regresi dapat disusun dengan persamaan regresi data panel berdasarkan model *fixed effects cross section weights* sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan}_{it} = 0.009361 + 0.000861\text{IDG}_{it} - 7.09e^{-05}\text{Riil}_{it} - 1.37e^{-06}\text{Pend}_{it} - 0.000346\text{Sanitasi}_{it} - 0.000346\text{SumberAir}_{it} - 5.70e^{-07}\text{PDRB}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Koefisien determinasi atau *adjusted R-squared*. *Adjusted R-squared* digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai *adjusted R-squared* itu antara satu dan nol, jika angkanya kecil mendekati nol maka kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen amatlah terbatas. Tetapi jika angkanya mendekati satu maka variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009). Berdasarkan tabel 4.12 hasil estimasi, maka dapat disimpulkan bahwa uji kecocokan model (R2) dilihat dari nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 0.865186 yang berarti variasi variabel independen yang terdiri dari PDRB, kesetaraan gender, pengeluaran riil per kapita disesuaikan, pengeluaran pendidikan, fasilitas sanitasi layak, akses sumber air minum mampu menjelaskan variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan sebesar 86,51 persen sedangkan sisanya 13,49 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam model.

Langkah berikutnya, yaitu melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji signifikan koefisien regresi yang diperoleh tanpa menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Keunggulan menggunakan data panel karena data panel memiliki implikasi dan memerlukan identifikasi parameter tertentu sehingga tidak perlu membuat uji yang asumsi ketat dan uji regresi linier seperti *ordinary least square* (Ajija, 2011). Dalam uji hipotesis terbagi dua, yaitu uji simultan (Uji F), dan uji parsial (Uji t) .

Selanjutnya uji global (uji F), uji F bertujuan untuk mengetahui variabel tingkat keuntungan, tingkat utang dan kepemilikan institutional secara keseluruhan mempengaruhi penghindaran pajak apabila Prob (F-Statistik) < α 5% artinya, terdapat pengaruh antara PDRB, IDG, pengeluaran riil disesuaikan, pengeluaran pendidikan, fasilitas sanitasi layak, akses sumber air minum terhadap tingkat kemiskinan dan apabila prob. (F-Statistik) > α 5% artinya, tidak terdapat pengaruh antara PDRB, IDG, pengeluaran riil disesuaikan, pengeluaran pendidikan, fasilitas sanitasi layak, akses sumber air minum terhadap tingkat kemiskinan. Pada tabel 10 menunjukkan nilai prob. (F-statistic) sebesar 0,0000 < α 5% artinya, terdapat pengaruh antara PDRB, kesetaraan Gender (IDG), pengeluaran riil disesuaikan, pengeluaran pendidikan, fasilitas sanitasi layak, akses sumber air minum terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, uji *t-statistic* adalah untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen (tingkat keuntungan, tingkat utang dan kepemilikan konstitusional) terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 10 diperoleh nilai koefisien IDG sebesar 0,000861, karena nilai prob-statistik (0,0045

$< 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender yang diukur dengan IDG berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien pengeluaran riil per kapita disesuaikan sebesar $-7,09E-05$ karena nilai prob-statistiknya ($0,0000 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran riil per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien pendidikan sebesar $-1,37E-06$, karena nilai prob-statistiknya ($0,1034 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dana pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai koefisien fasilitas sanitasi layak sebesar $-0,000346$ karena nilai prob-statistiknya ($0,0467 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas air minum layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien akses sumber air minum sebesar $-0,009151$ karena nilai prob-statistiknya ($0,0182 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa akses sumber air minum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien PDRB sebesar $-5,70E-07$ karena nilai prob-statistiknya ($0,0436 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2014 sampai 2019. Pada penelitian ini diperoleh hasil probabilitas sebesar 0.0436 lebih kecil dari α 5%, dan diperoleh juga koefisien dari variabel PDRB terhadap tingkat kemiskinan sebesar $-5,70E-07$, sehingga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat PDRB kabupaten/kota maka semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Hal ini disebabkan karena nilai PDRB yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menyebar di semua golongan baik itu golongan atas, menengah, maupun bawah termasuk penduduk miskin di Provinsi tersebut sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai peranan paling penting bagi pertumbuhan ekonomi di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT khususnya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dama et al. (2016), adanya pengaruh negatif antara PDRB dengan tingkat kemiskinan artinya, semakin tinggi tingkat PDRB maka semakin rendah tingkat kemiskinan karena semakin meningkatnya PDRB di wilayah tersebut dan adanya distribusi yang adil dan merata dari hasil pertumbuhan pertumbuhan PDRB yang akan berdampak pada terciptanya pembangunan di segala sektor lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmiyanti (2017), yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan PDRB di wilayah Provinsi NTT masih berjalan tidak merata dan terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi NTT, rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat pedesaan.

2. Pengaruh Pengeluaran Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT

Pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2014 sampai 2019 diperoleh hasil probabilitas $-0,1034$ lebih besar dari α 5% dan koefisien sebesar $-1,37E-06$ sehingga didapatkan hasil pengeluaran di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, tinggi rendahnya biaya pengeluaran pendidikan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hal ini disebabkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. SDM nya masih tergolong rendah berdasarkan data rata-rata lama sekolah dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di Provinsi NTT masih jauh di atas rata-rata. Sehingga masih banyak anak usia sekolah tidak lulus SMP yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penelitian ini sejalan sesuai dengan penelitian Fithri dan Kaluge (2017), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak digunakan dengan sebaiknya sehingga dana pendidikan belum mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Pengaruh Akses Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan

Akses sumber air minum layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2015 sampai 2019. Pada penelitian ini diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,00182 lebih kecil dari α 5%, dan diperoleh juga koefisien dari variabel sumber air minum layak terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0,009151, sehingga akses sumber air minum layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin banyak akses sumber air minum layak di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT maka semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Hal ini disebabkan karena banyaknya akses air minum layak yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah tersebut akan meningkatkan kesehatan pada masyarakat dan mencegah berbagai penyakit menular dan penyakit lainnya sehingga kesehatan masyarakat yang tinggi akan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Fasilitas sanitasi layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2015 -2019. Pada penelitian ini diperoleh probabilitas $0,0477 < 5\%$ (α) dan diperoleh juga koefisien dari variabel fasilitas sanitasi layak terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0,000346, sehingga hal ini menunjukkan bahwa fasilitas sanitasi layak berpengaruh negatif tingkat kemiskinan artinya semakin banyak fasilitas sanitasi layak di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT maka semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Penelitian ini sejalan dengan Mayasari (2020), menyatakan bahwa akses air bersih berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dikarenakan akses air minum tersebut dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia. Menurut Munoz-Pina et al. (2016), menunjukkan bahwa kesehatan lingkungan baik dari air minum layak dan sanitasi layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Mexico, karena lingkungan yang tidak sehat akan mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit dengan hal ini mengakibatkan kemiskinan.

4. Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Tingkat Kemiskinan.

Kesetaraan gender berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2015 -2019. Pada penelitian ini diperoleh probabilitas $0,0045 < 5\%$ (α) dan diperoleh juga koefisien dari variabel kesetaraan gender terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0,000861, semakin tinggi partisipasi perempuan maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki di provinsi NTT serta, adanya peningkatan pernikahan di usia muda serta banyaknya

perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dengan banyaknya tanggungan anak yang berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rogan (2016), menunjukkan hasil bahwa banyaknya peran wanita sebagai kepala keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Afrika Selatan. Dan sebagian besar perempuan masih banyak yang berkiprah di sektor informal/pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan canggih/spesifik dan memerlukan kualitas pengetahuan. Pekerjaan perempuan di sektor informal juga kurang memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai dan pendapatannya yang rendah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Fikri dan Suparyati (2017), bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di NTT.

5. Pengaruh Pengeluaran Riil Per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengeluaran per kapita disesuaikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2015 -2019. Pada penelitian ini diperoleh probabilitas $0,0477 < 5\%$ (α) dan diperoleh juga koefisien dari variabel pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan sebesar $-7,09E-05$, artinya semakin tinggi pengeluaran per kapitanya di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT maka semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Hal ini disebabkan rumah tangga mampu membeli/memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti makanan, minuman pakaian kendaraan pendidikan, sewa rumah hiburan perobatan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Pratama (2015), Rahman dan Alamsyah (2019), menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB, pengeluaran di bidang pendidikan, akses sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak, pengeluaran riil per kapita terhadap tingkat kemiskinan di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2015-2019.

Dari hasil analisis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama, PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT Periode 2015-2019. Kedua, pengeluaran di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT Periode 2015-2019. Ketiga, akses sumber air minum layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT Periode 2015-2019. Keempat, fasilitas sanitasi layak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT Periode 2015-2019. Kelima, kesetaraan gender berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT Periode 2015-2019. Keenam, pengeluaran riil per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2015-2019.

Beberapa saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini, yaitu pertama, diharapkan dapat menjadi sumber referensi para peneliti selanjutnya untuk lebih memahami mengenai analisis pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah dana pendidikan, akses air minum layak dan fasilitas sanitasi layak, kesetaraan gender dan pengeluaran riil per kapita terhadap tingkat kemiskinan sehingga dapat diadakan penelitian lanjut dengan variabel lainnya. Kedua, penelitian selanjutnya

dapat mengembangkan penelitian baik dengan menambah variasi variabel maupun menggunakan sampel kabupaten/ kota atau provinsi lainnya selain yang diuji dalam penelitian ini. Ketiga, dalam penelitian ini waktu yang digunakan hanya 5 tahun (2015-2019), diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil waktu pengamatan yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadien, Iskandar. (2019) Faktor Determinan Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat dengan Regresi Data Panel. *Forum Ekonomi FEB UNMUL*, 21 (1) 2019, 87-96. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Ajija, Shochrul. R. et al. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfana, M. A. F., Arif, D. F., Laksdiasri, W., & Rahmaningtias, A. (2017). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia, 1–21. <https://doi.org/10.31227/osf.io/v6uey>
- BPS Provinsi NTT. (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai dataset. <https://ntt.bps.go.id/>
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/13519>
- Fikri, R. O., & Suparyati, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Dan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi NTT. *Media Ekonomi*, 25(1), 43. <https://doi.org/10.25105/me.v25i1.5203>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D. (2010). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill. ASIN: B01NGZRGVV
- Kahang, M. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130–140. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/863>
- Labola, Y. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di NTT, 6 (February), 571–578. https://www.researchgate.net/publication/322959097_Faktor-faktor_yang_Memengaruhi_Kemiskinan_di_NTT
- Manoppo, J. J. E., Engka, D. S. M., Tumangkeng, S. Y. L., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 216–225. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20249>
- Mayasari, T. R. (2020). Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Variabel Kesehatan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Siger Matematika*, 1(1), 24–30. <https://doi.org/10.23960/jsm.v1i1.2471>

- Monang, S. Tambun, J., & Bangun, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574>
- Muhammad, AF., Hafizha, KP., Setyaningrum, MA., Zahra, RA., Pramanto, TD., Pitoyo, AJ., Alfana, MAF. (2020). Analisis Pembangunan Gender di Provinsi NTT, Indonesia. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26830.69444>.
- Munoz-Pina, C., Rivera, M., Morales, R., & Aguirre, A. (2016). Poverty and the environment in Mexico. The right to a healthy environment Munoz-Pina, Rivera, Morales, and Aguirre. Green Growth Knowledge Platform (GGKP) Fourth Annual Conference on Transforming Development Through Inclusive Green Growth, (September), 6–7. <https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Munoz-Pina>
- Nalle, F. W. dan Kiha E. K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Ttu). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 35. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45>
- Nunung, Nurwati. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol.10(1), 1-11. <https://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1/2434>
- Palenewen, TOM, Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20950>
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Putra, H. S., & Rianto, N. (2016). Pengaruh Akses Air Bersih terhadap Kemiskinan di Indonesia: Pengujian Data Rumah Tangga, Vol. 9(1), 65–76. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=954319&val=14695&title=AKSES%20AIR%20BERSIH%20DAN%20KEMISKINAN%20DI%20INDONESIA%20PENGUJIAN%20DATA%20RUMAH%20TANGGA>
- Putri, R. Y., Azhar, Z., & Putri, Z. D. (2019). Analisis Kemiskinan Berdasarkan Gender di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1(2), 603-612. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/6285>
- Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546>
- Rahmiyanti, D. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2011-2015. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28880/>
- Rizki, Bhimo, dan Saleh, Samsubar (2007). Keterkaitan Akses Sanitasi dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah. *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol. 12(3),

- 223-233. <https://media.neliti.com/media/publications/26442-EN-keterkaitan-akses-sanitasi-dan-tingkat-kemiskinan-studi-kasus-di-propinsi-jawa-t.pdf>
- Rogan, M. (2016). Gender and Multidimensional Poverty in South Africa: Applying the Global Multidimensional Poverty Index (MPI). *Social Indicators Research*, 126(3), 987–1006. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0937-2>
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 106–118. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE>
- S., Rika. D., Munawaroh, M., & Puruwita, D. (2012). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 10(2), 144-157. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.01>
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- Winarno, Wing Wahyu.2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta: Salemba Empat.